

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR: 028/HK.01.01/K.PD/11/2025**

**TENTANG**

***FOCUS GROUP DISCUSSION* PERATURAN BAWASLU DAN NON PERBAWASLU  
BAGI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI MASYARAKAT DI PROVINSI PAPUA  
BARAT DAYA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, profesionalitas, dan keseragaman pemahaman penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua Barat Daya terhadap ketentuan peraturan Bawaslu serta regulasi non-Bawaslu yang berkaitan dengan tugas pengawasan, diperlukan penyelenggaraan forum diskusi yang terstruktur dan komprehensif;
  - Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* sebagaimana huruf a, maka perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tentang Pembentukan panitia pelaksana kegiatan *Focus Group Discussion* Peraturan Bawaslu dan Non Perbawaslu Bagi Kepemudaan dan Organisasi Masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Tentang Penetapan Panitia Kegiatan *Focus Group Discussion* Peraturan Bawaslu Dan Non Perbawaslu Bagi Kepemudaan Dan Organisasi Masyarakat Di Provinsi Papua Barat Daya
- KESATU** : Membentuk panitia *Focus Group Discussion* Peraturan Bawaslu Dan Non Perbawaslu Bagi Kepemudaan Dan Organisasi Masyarakat Di Provinsi Papua Barat Daya dengan keanggotaan panitia pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia pelaksana ini pada Diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan kegiatan secara administrasi dan teknis dari persiapan sampai pada pelaksanaan
  - b. Setelah pelaksanaan kegiatan secara teknis bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Ketua dan Kordiv serta secara

Tembusan :

1. Sekjen Bawaslu R.I ;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat (sebagai laporan);
3. Arsip.



administrasi kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat  
Daya

- KETIGA** : Panitia pelaksana dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya;
- KEEMPAT** : Pembiayaan terhadap Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Tahun 2025 ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sorong  
Pada tanggal, 28 November 2025

**KEPALA SEKRETARIAT**



**FELIUS CORNELIS BOLING, S.STP.,M.Si.**  
Pembina Tingkat 1 (IV/b)  
NIP. 198002211999121001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
 NOMOR : 028/HK.01.01/K.PD/11/2025  
 TANGGAL : 28 November 2025

| NO | NAMA                                      | JABATAN                       | KEDUDUKAN                |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1  | Felipus Cornelis Boling,<br>S.STP., M.Si  | Kepala Sekretariat            | Ketua                    |
| 2  | Mesak Sesa, S.E.                          | Kepala Bagian<br>Administrasi | Koordinator Acara        |
| 3  | Wenda Virsilia Lusianak                   | Staf P3S                      | Anggota                  |
| 4  | Elvira Vivien Ivany Kbarek                | Bendahara Pengeluaran         | Anggota                  |
| 5  | Jenny Bermalang                           | Staf Keuangan                 | Anggota                  |
| 6  | Agus Salim                                | Staf Perencanaan              | Anggota                  |
| 7  | Maria Gabriilya Paliyama                  | Staf Administrasi             | Anggota                  |
| 8  | Johanna Yolanda Sibarani                  | Staf Keuangan                 | Anggota                  |
| 9  | Indah Setyowati                           | Staf Keuangan                 | Anggota                  |
| 10 | Paskalin Everdika<br>Mandosir             | Staf Keuangan                 | Anggota                  |
| 11 | Anita Srimulin Sara<br>Kambuaya           | Staf Keuangan                 | Anggota                  |
| 12 | Fadli Hidayat                             | Staf Keuangan                 | Anggota                  |
| 13 | Eva Tri Hanifah                           | Staf P3S                      | Anggota                  |
| 14 | Hendra Wijaya Lamanasa,<br>S.STP., M.A.P. | Kepala Bagian P2H             | Koordinator Dokumentasi  |
| 15 | Simon Alex Flasao                         | Staf Keuangan                 | Anggota                  |
| 16 | M. Sarbi Talaohu                          | Staf Keuangan                 | Anggota                  |
| 17 | Miftahur Rahim                            | Staf P2H                      | Anggota                  |
| 18 | Febriani Ketura Dersi<br>Iwanggin         | Staf P2H                      | Anggota                  |
| 19 | Syahrianti Nur Sakinah R.                 | Staf P2H                      | Anggota                  |
| 20 | Arif Mahaputra Ramadhan                   | Staf P3S                      | Anggota                  |
| 21 | M. Khaidir Arie                           | Staf P3S                      | Anggota                  |
| 22 | Sefnath Kareth, S.H.                      | Kepala Bagian HP3S            | Koordinator Perlengkapan |
| 23 | Miguel Guterres                           | Staf Administrasi             | Anggota                  |
| 24 | Fredy Sabandar                            | Staf Administrasi             | Anggota                  |
| 25 | Robert Maromon                            | Staf P2H                      | Anggota                  |
| 26 | Marlon Hetharia                           | Staf P2H                      | Anggota                  |
| 27 | Manfred B. Jensenem                       | Staf Bawaslu Kota Sorong      | Anggota                  |
| 28 | Anjas F. Bara                             | Outsourcing                   | Anggota                  |

Tembusan :

1. Sekjen Bawaslu R.I ;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat (sebagai laporan);
3. Arsip.



|    |                        |             |         |
|----|------------------------|-------------|---------|
| 29 | Stanley Sambul         | Outsourcing | Anggota |
| 30 | Cristian E. P. Renyaan | Outsourcing | Anggota |
| 31 | Nejo Beay              | Outsourcing | Anggota |

**KEPALA SEKRETARIAT**



**FELIPUS CORNELIS BOLING, S.STP.,M.Si.**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 198002211999121001**